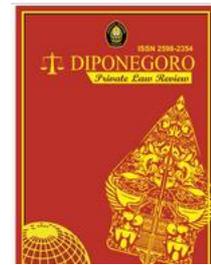


DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



Implikasi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Perubahan Lagu Secara Ilegal

**Amanda Dwi Cahyani Putri, Faristin Nabila Priwahyuni, Oagri Bekti
Mulyani, Ivanda Adhis Permata Putri, Fiska Rinita Purwiyastanti**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

✉ amandaputri234@students.unnes.ac.id

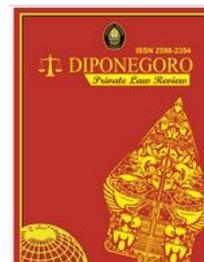
ABSTRACT

Copyright is an exclusive right that arises automatically after a work is realized in physical form, without any reduction or restrictions regulated by statutory regulations. This definition is stated in Article 1 Number 1 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Copyright is different from other types of intellectual property rights. Basically, copyright can protect ideas, information or facts from individuals, so this ownership concept does not have to be formally registered. Economic rights are exclusive rights owned by the creator or copyright holder to obtain economic benefits from their work. However, in reality, copyright violations still often occur without paying attention to the moral and economic rights of the creator or copyright holder. Therefore, this research aims to identify the legal implications of copyright violations committed by artists who change the ownership status of song works that were previously recognized as belonging to another creator. This research uses a normative juridical approach, by analyzing data from various written sources about law, such as laws and the Civil Code. This research has descriptive analytical characteristics which begins with the collection of documents or legal references relating to illegal copyright violations by artists who change the composer of the song.

Keywords: *Copyright, Economic Rights, Violation*

ABSTRAK

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa adanya pengurangan atau

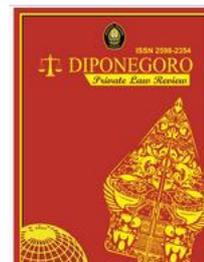
DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Definisi ini tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta berbeda dengan jenis hak kekayaan intelektual lainnya. Pada dasarnya, hak cipta dapat melindungi ide, informasi, atau fakta dari individu, sehingga konsep kepemilikan ini tidak harus didaftarkan secara formal. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karyanya. Namun, pada kenyataannya, masih sering terjadi pelanggaran hak cipta tanpa memperhatikan hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi hukum dari pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh artis yang mengubah status kepemilikan karya lagu yang sebelumnya diakui sebagai milik pencipta lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan melakukan analisis data dari berbagai sumber tertulis tentang hukum, seperti Undang-Undang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitis yang dimulai dengan pengumpulan dokumen-dokumen atau referensi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran ilegal hak cipta oleh artis yang mengubah pencipta lagu

Kata Kunci: *Hak Cipta, Hak Ekonomi, Pelanggaran*

PENDAHULUAN

Setiap manusia pasti dilahirkan dengan pikiran untuk berpikir secara kritis agar menghasilkan suatu karya, seni, dan pemikiran yang terus maju. Dari hal tersebut maka dikenal dengan hak cipta, tujuan dari adanya hak cipta adalah untuk memberikan perlindungan pada hasil karya yang telah diciptakan agar terhindar dari adanya plagiarisme. Perlindungan hak cipta mempunyai konsep perlindungan langsung ketika ciptaannya berwujud, bahkan tidak melalui proses pencatatan. (Dharmawan 2018, 120). Hak cipta merupakan hak yang langsung berasal dari seseorang yang memiliki ide atau gagasan berdasarkan prinsip deklaratif yang menghasilkan dua jenis hak bagi pemilik ide atau pemegang hak cipta, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi yang diuraikan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah

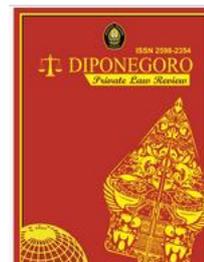
DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang dihasilkannya. Ini melibatkan hak untuk meraih keuntungan, pengakuan, serta memberikan izin untuk menggunakan hak kekayaan intelektualnya guna menerima royalti. Di sisi lain, hak moral, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah hak yang melekat secara permanen pada pencipta karya. Hak ini mencakup kemampuan pencipta untuk mencantumkan namanya dalam konteks penggunaan karya oleh masyarakat umum, perubahan yang mungkin terjadi pada karya tersebut, serta perlindungan terhadap haknya jika ada tindakan yang merugikannya. (Pradnyan and Kurniawan 2020, 1729).

Musik dan lagu adalah karya seni yang sangat disukai oleh masyarakat. Hampir semua orang menikmati mendengarkan lagu dalam kehidupan sehari-hari mereka. (Wahyuni, Wiwik and Rosito 2021, 409) Lagu adalah sebuah karya yang memiliki perlindungan hukum, dan meskipun terdiri dari tiga elemen, yaitu melodi, lirik, dan aransemen, termasuk notasi musiknya, semuanya merupakan karya yang dilindungi oleh hak cipta. (Munandar and Sitanggang 2011, 14). Dampak negatifnya adalah bahwa banyak individu yang menyalahgunakan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk keuntungan pribadi dengan cara menyalin atau mengubah karya asli tanpa izin dari pemiliknya (Utama, dkk 2019, 78-83).

Pelanggaran hak cipta lagu dapat mencakup tindakan seperti menyalin, menggandakan, atau membajak lagu tanpa izin dari penciptanya, mengubah lirik, melodi, atau nada lagu tanpa persetujuan dari pemegang hak cipta, yang dapat mengakibatkan dampak negatif bagi pemilik hak cipta, seperti menyebarkan aransemen lagu tanpa lisensi atau tidak membayar royalti (Hasibuan 2008, 241).

W.R. Comish menyatakan bahwa hak milik intelektual berfungsi untuk melindungi pemanfaatan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial (Dewi, dkk 2017, 510). Namun, ada batasan tertentu yang perlu diikuti agar kekayaan intelektual dan hasil karya tidak disalahgunakan, termasuk ketentuan hukum, etika, dan ketertiban sosial (Usnaini 2009, 1)

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

.Pencipta atau pemilik hak cipta pasti akan mengalami kerugian finansial yang seharusnya mereka terima akibat pelanggaran atas karya mereka.

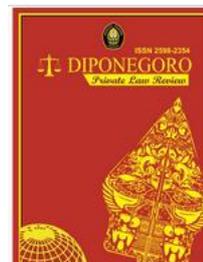
Salah satu hal yang terjadi dalam pelanggaran hak cipta adalah menyanyikan lagu tanpa izin pencipta dan mengubah nama pencipta asli dengan nama orang lain. Seperti halnya pada kasus yang menjerat nama artis terkenal Tina Toon pada tahun 2001, Tina Toon digugat oleh Engkan Herikan pencipta lagu "Bintang" di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam gugatannya Engkan Herikan meminta ganti rugi materiil dan immateriil dengan total Rp 10,7 miliar.

Selain Tina Toon, Engkan juga mengajukan tuntutan hukum terhadap label rekaman yang mewadahi dirinya. Ini mengindikasikan bahwa dalam kasus ini, pencipta lagu merasa dirugikan dari segi hak intelektual dan finansial. Situasi ini muncul karena lagu "Bintang" telah menjadi populer sejak dinyanyikan oleh Band Anima pada tahun 2006. Setiap pencipta lagu sudah mengetahui siapa penyanyi asli lagu tersebut dan pencipta liriknya. Dengan perubahan nama pencipta lagu yang dilakukan oleh Tina Toon, ini dianggap sebagai pelanggaran hak cipta yang bertentangan dengan hukum yang melindungi pemegang hak cipta lagu "Bintang" tersebut. Oleh karena itu, tuntutan yang diajukan oleh pencipta lagu kepada Tina Toon sesuai dengan peraturan hukum, di mana pencipta memerlukan perlindungan hukum dan harus memperoleh kembali hak ekonominya yang seharusnya menghasilkan banyak keuntungan dari lagu tersebut.

Tulisan ini memfokuskan pada masalah mengenai bagaimana jika karya asli sebuah lagu di gantikan dengan nama pihak lain dan bagaimana perlindungan hukum terkait dengan karya lagu agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak cipta, terutama dalam konteks

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

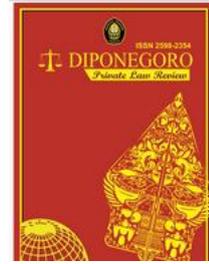
perubahan secara ilegal. Metode ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karya Asli Sebuah Lagu di Gantikan Dengan Nama Pihak Lain

Seorang pencipta adalah individu atau kelompok orang yang, berkat inspirasi mereka, menciptakan suatu karya menggunakan kemampuan berpikir, imajinasi, ketelitian, keterampilan, atau keahlian mereka. Karya tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk yang unik dan memiliki ciri khasnya sendiri (Winarno 2014). Dalam konteks Hak Cipta, hak cipta dibagi menjadi dua jenis, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya dan produk terkaitnya, sementara hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihapuskan tanpa alasan tertentu, bahkan jika Hak Cipta atau Hak Terkaitnya dialihkan kepada pihak lain. Sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, selama mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rohaini, dkk 2018).

Pemilik hak cipta adalah pencipta yang memiliki hak atas karyanya atau individu atau entitas lain yang mendapatkan hak tersebut dari pencipta atau dari pihak lain yang mendapatkan hak tambahan dari pemilik hak cipta di atasnya. Jika kita merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan tentang pembagian hak cipta menjadi hak moral dan hak ekonomi. Asal usul hak moral, atau hak etis, berasal dan berkembang di Perancis, di mana konsep hak cipta sering disebut sebagai fondasi hak cipta, berbeda dengan pendekatan hak cipta di Inggris. Konsep Perancis menekankan bahwa kreativitas adalah hasil dari pemikiran dan intelektualitas manusia. Oleh karena itu, karya cipta tidak dapat dipisahkan dari karakteristik pribadi penciptanya, dan hak ini akan selalu melekat pada pencipta, meskipun kemudian kepemilikan atas karya tersebut dapat dialihkan kepada pihak

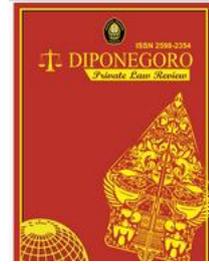
DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

lain. Konsep hak ekonomi, atau yang dikenal sebagai hak ekonomi, pada awalnya hanya berfungsi sebagai alat untuk melayani tujuan komersial yang diatur oleh Kerajaan Inggris. Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini berkembang menjadi pengakuan atas karya cipta dan diimplementasikan dalam bentuk royalti ekonomi. Hak ekonomi, di negara ini, adalah hak di mana seseorang dapat memperoleh manfaat ekonomidari hasil karya yang telah diciptakannya.

Dalam pasal 9 UU No. 28 2014 terkait ekonomi sendiri sudah dirincikan secara detail bahwasanya dalam pasal 8 pembuat karya dapat menerima haknya dalam hal ekonomi dengan melakukan :

- a. Pembuatan karya
- b. Reproduksi karya dalam semua bentuk
- c. Terjemahan karya
- d. Modifikasi, pengaturan ulang, atau transformasi karya
- e. Distribusi karya atau salinannya
- f. Penampilan karya
- g. Pengumuman karya
- h. Komunikasi karya
- i. Penyewaan karya

Jika seseorang telah memanfaatkan hak ekonominya, maka orang tersebut harus memperoleh izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pada tahun 2001 artis penyanyi Agustina Hermanto atau yang biasa di sapa dengan Tina Toon tersangkut kasus pelanggaran hak cipta dimana Tina Toon digugat oleh Engkan Herikan Pencipta Lagu “ Bintang “ yang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, gugatan itu dilayangkan oleh Engkan Herikan karena Tina Toon telah merilis lagu “Bintang” dibawah naungan Perusahaan Produksi Iniversal Music Indonesia dan menyanyikan lagu bintang tersebut tanpa adanya ijin dari Engkan Herikan sebagai Pencipta lagu, bahkan Pencipta lagu bintang tersebut telah diubah nama menjadi Basia Sarita Kaban dan Baros Roulette, oleh kerana itu ada hak yang dilanggar oleh Pihak Tino Toon yakni Hak Intelektual dari Pencipta Lagu Engkan Herikan, oleh karena itu Pihak Tino Toon dapat dituntut dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 113 Ayat 2 “Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk Penggunaan secara komersial dipidanan dengan pidana penjara paling lam 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Oleh karena itu, menggantikan pencipta lagu dengan nama orang atau entitas lain dalam konteks hak cipta adalah tindakan yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini terkait dengan pelanggaran hak cipta dan identitas kreatif.

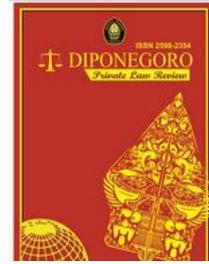
a. Pelanggaran hak cipta

Menggantikan pencipta lagu dengan nama orang atau entitas lain tanpa izin atau persetujuan dari pencipta asli dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak cipta memberikan pencipta lagu hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya, termasuk hak untuk menentukan siapa yang dapat diakui sebagai pencipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta yang berlaku (Hikmasari 2023).

b. Identitas kreatif

Penggantian pencipta lagu dengan nama pihak lain juga melibatkan masalah identitas kreatif. Pencipta lagu memiliki hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut dan memiliki hak untuk menjaga reputasi mereka sebagai pencipta karya tersebut dan memiliki hak untuk menjaga reputasi sebagai seniman (Pricillia,dkk 2018).

Bahwasanya diatas sudah dijelaskan pelanggaran hak cipta dan identitas kreatif dapat memiliki konsekuensi hukum yang fatal. Sanksi hukum yang mungkin termasuk pembayaran ganti rugi kepada pencipta asli, penghentian distribusi karya yang melanggar, serta potensi tuntutan perdata dan pidana, tergantung pada yurisdiksi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang. Dari masalah tersebut sudah seharusnya pencipta lagu dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggantian nama harus mencari solusi yang sah dan etis untuk menyelesaikan masalah tersebut, penyelesaian masalah tersebut juga dapat mencakup seperti perundingan, pembayaran royalti, atau pengakuan pencipta asli dalam catatan kredit. Hal tersebut akan membantu menghindari masalah hukum

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

dan menjaga integritas kreatif serta reputasi dalam industri musik (Rahmanda, dkk 2021).

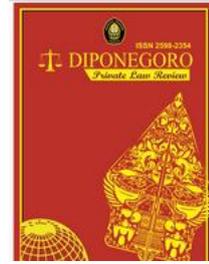
Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Karya Lagu

Karya musik atau lagu adalah bentuk kreasi intelektual yang memiliki nilai penting dalam konteks perlindungan hak cipta. Ketika kita mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya musik atau lagu, kita tidak dapat mengabaikan signifikansinya. Dengan adanya mekanisme perlindungan hak cipta yang diberikan pada karya musik atau lagu, kita dapat mengaitkannya dengan dua aspek utama: perkembangan kebudayaan dan potensi ekonomi (Labetubun 2019).

Perlindungan hak cipta terhadap karya musik atau lagu memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan kebudayaan. Ini karena musik dan lagu adalah bagian integral dari ekspresi budaya masyarakat. Hak cipta memastikan bahwa pencipta musik atau lagu memiliki kendali atas karya-karya mereka, dan ini mendorong kreativitas serta inovasi dalam dunia musik. Selain itu, perlindungan hak cipta juga memelihara warisan budaya dengan memastikan bahwa karya-karya berharga ini tetap terjaga, terdokumentasi, dan tersedia untuk generasi mendatang (Asril, Permata and Ramli 2021).

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dijelaskan pengertian hak cipta. Ini mengacu pada hak eksklusif yang dimiliki secara otomatis oleh individu berdasarkan prinsip deklaratif (Tampubolon 2022, 642-650). Prinsip ini merujuk pada sistem di mana pencipta lagu tidak diwajibkan untuk mendaftarkan karyanya terlebih dahulu agar memiliki hak atas ciptaannya. Dengan kata lain, meskipun pencipta belum mendaftarkan karyanya, dia tetap memiliki hak untuk mengendalikan karyanya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat menggunakan karyanya tanpa izin (Ningrat, dkk 2020).

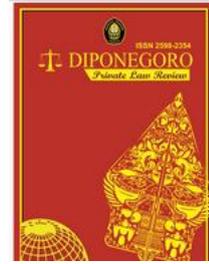
Perubahan nama pencipta lagu tanpa izin dalam konteks pelanggaran hak cipta secara ilegal dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak moral pencipta, yang melibatkan integritas kreatif dan pengakuan paternity atas karya tersebut. Akibat hukumnya dapat mencakup tuntutan hukum oleh pencipta asli untuk pemulihan hak cipta dan ganti rugi. Pihak

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

yang melakukan perubahan nama tanpa izin juga dapat menghadapi sanksi perdata dan pidana tergantung pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa konsekuensi hukum dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku. Dalam banyak kasus, hukum hak cipta memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak moral pencipta dan memberikan dasar hukum untuk menuntut pelanggaran tersebut.

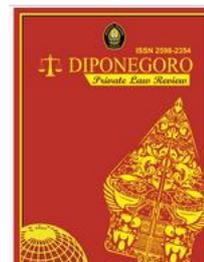
Dengan mencatat bahwa karya tersebut telah dibuat dalam bentuk yang nyata, ketika suatu karya yang dibuat oleh seseorang telah selesai atau ada dalam bentuk fisik, karya cipta tersebut dapat sangat rentan terhadap tindakan penjiplakan atau peniruan oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Tindakan yang menunjukkan adanya pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika perbuatan tersebut telah mengambil alih hak eksklusif dari pencipta atau pihak yang memiliki hak cipta atas suatu karya (Juriadi 2021). Oleh karena itu, istilah "upaya hukum" mengacu pada tindakan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh seseorang, di mana dalam konteks ini, seseorang adalah pemilik hak eksklusif suatu karya, sehingga mereka dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.

Pencipta karya memiliki dua jenis upaya hukum yang dapat digunakan, yaitu pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif adalah langkah-langkah yang diambil oleh pencipta untuk mencegah atau menghindari potensi masalah terkait dengan hak cipta mereka, seperti pelanggaran oleh versi lain dari karya cipta yang dimiliki. Sebagai pemegang hak cipta, pencipta lagu memiliki peran sentral dalam memastikan perlindungan hak cipta mereka (Soemarsono and Dirkareshza 2021). Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh pencipta adalah mendaftarkan karyanya. Ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang kuat yang dapat digunakan di pengadilan jika ada pelanggaran hak cipta di masa depan. Selain itu, penting bagi pencipta untuk memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yang akan membantu mereka memahami hak-hak yang dimiliki atas karyanya. Ini akan memungkinkan pencipta untuk mengetahui tindakan apa yang harus diambil jika mereka menghadapi situasi di mana hak cipta mereka dilanggar, seperti

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>

pembajakan, plagiarisme, atau modifikasi oleh pihak lain. Selain pendekatan preventif, pencipta karya juga dapat menggunakan upaya hukum represif. Upaya represif adalah tindakan yang diambil setelah pelanggaran hak cipta terjadi atau ditemukan. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Hak Cipta, ada dua jalur yang dapat ditempuh dalam upaya hukum represif. Pertama, melalui jalur non litigasi, di mana upaya penyelesaian sengketa dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. Jalur ini memungkinkan pihak-pihak terlibat untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan pengadilan. Kedua, pencipta lagu juga dapat memilih jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga jika mereka ingin mengejar tindakan hukum lebih lanjut terhadap pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, pencipta karya memiliki pilihan yang beragam untuk melindungi hak cipta mereka, baik melalui tindakan preventif maupun represif, sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Selanjutnya, Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa jika pencipta atau pemilik hak cipta merasa menjadi korban diskriminasi karena pelanggaran hak cipta, mereka memiliki opsi untuk mengajukan permohonan putusan provisi kepada Pengadilan Niaga. Putusan provisi ini dimaksudkan untuk mengambil beberapa tindakan, pertama, permintaan untuk menyita karya ciptaan yang telah secara ilegal diumumkan atau diperbanyak. Kedua, permintaan untuk menyita peralatan yang digunakan dalam proses reproduksi produk hasil ciptaan yang melanggar hak cipta. Selain itu, dalam permohonan provisi, mereka dapat meminta penghentian segala bentuk kegiatan yang melanggar hak cipta, termasuk penyiaran dan distribusi hasil pelanggaran. Dengan semakin ketatnya peraturan hak cipta, individu atau entitas yang berencana atau telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Hak Cipta harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta itu sendiri, diharapkan dapat mengurangi aktivitas yang melanggar hukum, seperti mengubah lirik tanpa mengubah struktur dasar dari karya cipta seseorang (Mikafa, dkk 2022).



SIMPULAN

Penggantian pencipta lagu dengan nama pihak lain tanpa izin atau persetujuan pencipta asli merupakan pelanggaran hak cipta. Hak cipta memberikan pencipta lagu hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan karyanya, termasuk hak untuk menentukan siapa yang dapat dikreditkan sebagai pencipta. Pelanggaran hak cipta dan identitas kreatif dapat memiliki konsekuensi hukum yang fatal, termasuk pembayaran ganti rugi kepada pencipta asli, penghentian distribusi karya yang melanggar, serta potensi tuntutan perdata dan pidana, tergantung pada yuridiksi dan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh setiap orang.

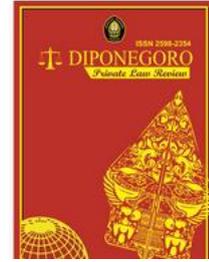
Perlindungan hak cipta terhadap karya musik atau lagu memiliki dampak yang mendalam pada perkembangan kebudayaan dan potensi ekonomi. Hak cipta memastikan bahwa pencipta musik atau lagu memiliki kendali atas karya-karya mereka, mendorong kreativitas, inovasi, dan pelestarian warisan budaya. Upaya hukum untuk melindungi hak cipta mencakup pendekatan preventif dan represif, dengan pencipta dapat mendaftarkan karya mereka dan mengambil tindakan hukum jika pelanggaran terjadi. Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan opsi kepada pencipta atau pemilik hak cipta untuk mengajukan permohonan putusan provisi kepada Pengadilan Niaga jika merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta. Sanksi hukum termasuk putusan provisi yang dapat menyita karya ilegal dan peralatan yang digunakan dalam pelanggaran hak cipta. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak cipta, diharapkan dapat mengurangi aktivitas melanggar hukum, seperti penggantian nama pencipta lagu tanpa izin.

Di bawah ini adalah beberapa saran tambahan yang dapat membantu individu atau pemilik hak cipta dalam melindungi karya mereka:

1. Pentingnya Kepatuhan terhadap Hak Cipta: Saran pertama adalah untuk selalu memahami dan mematuhi hak cipta dalam industri musik. Pihak yang ingin menggunakan karya orang lain sebaiknya mendapatkan izin atau lisensi dari pencipta asli, terutama jika ingin menggantikan pencipta dengan nama pihak lain. Ini akan

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



membantu menghindari masalah hukum dan konflik yang mungkin timbul.

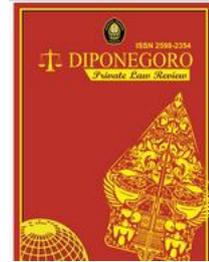
2. Pendaftaran Hak Cipta: Bagi pencipta lagu, sebaiknya pertimbangkan untuk secara resmi mendaftarkan karya mereka. Meskipun hak cipta secara otomatis diberikan setelah menciptakan karya, pendaftaran dapat memberikan bukti yang lebih kuat jika ada pelanggaran hak cipta. Ini juga akan meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak Anda.
3. Kerjasama dalam Industri Musik: Dalam industri musik, kerjasama sangat penting. Berkomunikasi dengan para pemain lain dalam industri seperti produser, label rekaman, dan distributor, adalah langkah kunci untuk memastikan hak cipta tetap di hormati dan di lindungi.
4. Kepatuhan Terhadap Standar Etika: Selalu menjaga integritas dan etika tinggi dalam dunia musik. Menghormati hak cipta orang lain adalah tindakan positif yang akan membantu untuk mempertahankan reputasi baik sebagai pencipta dan seniman.

DAFTAR PUSTAKA

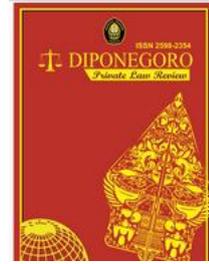
- Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli. "Perlindungan Hak Cipta pada Platform Digital Kreatif YouTube." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146-162.
- Dewi, Anak Agung Mirah Satria, and Anak Agung Mirah. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 6, no. 4 (2017): 508-520.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi hukum kekayaan intelektual Indonesia*. Swasta Nulus, 2018.
- Hikmasari, Inge Kalista. "Perlindungan Hukum Kepada Pencipta Lagu Yang Diumumkan Tanpa Seizin Pencipta." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 9 (2023): 2945-2971.

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>



- Irmayanti, SLDV, dan Ni Putu Purwanti. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud." *Kertha Semaya* 7, no. 4 (2019): 1-15.
- Juriadi, Juriadi. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Terkait Hak Cipta Atas Peng-Cover-An Lagu Di Facebook Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Islam." *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 1022-1041.
- Labetubun, Muchtar AH. "Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek)." *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 151-166.
- Maharani, Dhea Yulia. "Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggandaannya Dalam Media Sosial Lainnya." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 9, no. 1 (2021): 55-67.
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, dan Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Negara Kesejahteraan Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 187-216.
- Ningrat, Raden Ayu Putu Wahyu, Dewa Gede Sudika Mangku, dan I. Nengah Suastika. "Akibat Hukum Terhadap Pelaku Pelanggar Hak Cipta Karya Cipta Lagu Dikaji Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Dan Hak Cipta ACT (Bab 63, Edisi Revisi 2006)." *Tinjauan Hukum Ganesha* 2, no. 2 (2020): 180-192.
- Permatasari, Adelia, dan Rakhmita Desmayanti. "Proses Pemberian Royalti Kepada Ahli Waris (Papa T Bob) Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 1 (2022): 211-218.
- Pricillia, Luh Mas Putri, dan I. Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 8.
- Purba, Nico Bungaran. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dan Pemegang Hak Cipta Lagu "Lagi Syantik"." (2021).
- Raharja, Gan Gan Gunawan. "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film." *Jurnal Meta-Yuridis* 3, no. 2 (2020).

DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr>


-
- Rahmanda, Bagus, dan Kornelius Benuf. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok." *Tinjauan Hukum, Pembangunan dan Keadilan* 4, no. 1 (2021): 29-44.
- Rohaini, Rohaini, Eka Rusmawati Dianne, and Ahmad Faldy. "Perlindungan Hukum Penggunaan Musik Sebagai Latar Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Hak Cipta." *Pactum Law Journal* 1, no. 04 (2018): 321-335.
- Saragih, Andree Nugroho. "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023).
- Soemarsono, Langit Rafi, dan Rianda Dirkareshza. "Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 615-630.
- Stevanus, Prananta, Inri Januar, dan Radisman Saragih. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Film Atas Kegiatan Streaming Film Yang Ditayangkan Tanpa Izin Pada Website Ilegal." (2022).
- Tampubolon, Saritua. "Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atau Musik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Proses Iain Batusangkar* 1, no. 1 (2022): 642-650.
- Utama, Arya, Titin Titawati, and Aline Febryani Loilewen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004." *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78-83.
- Wahyuni, Wiwik. "Hubungan Antara Self-Regulated Learning Dan Intensi Penggunaan Media Sosial Pada Remaja Di Kota Medan." (2021).
- Werung, Adelina. "Sanksi Hukum Tentang Hak Cipta Terhadap Pengunduh Film Di Internet Secara Ilegal." *Lex KejahaTAN* 11, tidak. 5 (2022).
- Winarno, Jatmiko. "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Independent* 2, no. 2 (2014): 24-28.